

OPTIMALISASI ADMINISTRASI DALAM MENDUKUNG KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA PADA MASA NON-TAHAPAN PEMILU

Adindi Alimatus Sa'diah¹, Indira Arundinasari²

adindialimatus01@gmail.com¹

UPN Veteran Jawa Timur

ABSTRAK

Administrasi memiliki peran strategis dalam menunjang kinerja kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Pada periode ini, Bawaslu tetap menjalankan fungsi kelembagaan melalui pengelolaan dokumen, administrasi keuangan, serta penataan arsip kelembagaan guna menjaga akuntabilitas dan kesiapan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi administrasi dalam menunjang kinerja Bawaslu Kota Surabaya pada masa non-tahapan pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses administrasi, studi dokumentasi, serta wawancara informal dengan staf sekretariat yang terlibat dalam pengelolaan administrasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi administrasi di Bawaslu Kota Surabaya tercermin melalui pelaksanaan pengelolaan dokumen dan administrasi keuangan yang tertib, khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan dan dokumen pertanggungjawaban, penataan data administrasi, serta penerapan sistem kerja berbasis digital. Optimalisasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan ketertiban administrasi, efisiensi kerja, serta akuntabilitas kelembagaan pada masa non-tahapan pemilu. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti tingginya volume dokumen dan keterbatasan sumber daya pendukung. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung kinerja Bawaslu secara optimal.

Kata Kunci : Administrasi Publik, Kinerja Kelembagaan, Bawaslu, Non-Tahapan Pemilu, Administrasi Keuangan.

ABSTRACT

Administration plays a strategic role in supporting the institutional performance of the Surabaya City Election Supervisory Agency, particularly during the non-election period. During this period, Bawaslu continues to perform its institutional functions through document management, financial administration, and institutional archive management to maintain accountability and organizational readiness. This study aims to analyze the optimization of administration in supporting the performance of Bawaslu Surabaya City during the non-election period. The research method used is a qualitative approach with a descriptive design. Data collection was conducted through direct observation of the administrative process, documentation studies, and informal interviews with secretariat staff involved in administrative management. Data analysis techniques were carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that administrative optimization at Bawaslu Surabaya City is reflected in the orderly implementation of document management and financial administration, particularly in the management of financial administration and accountability documents, administrative data management, and the implementation of a digital-based work system. This optimization contributes to improving administrative order, work efficiency, and institutional accountability during the non-election period. However, several obstacles were still encountered, such as the high volume of documents and limited supporting resources. Therefore, strengthening the administrative system and utilizing information technology on a continuous basis is necessary to support Bawaslu's optimal performance.

Keywords: *Public Administration, Institutional Performance, Bawaslu, Non-Election Stages, Financial Administration.*

PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu adalah sebuah lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam memastikan kualitas demokrasi dengan mengawasi semua prosedur pemilu di Indonesia. Keberadaan Bawaslu sangat vital untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang berlandaskan prinsip demokratis, jujur, dan adil melalui tindakan pengawasan, pencegahan, serta penanganan terhadap pelanggaran pemilu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Tugas pengawasan ini tidak hanya dilakukan selama periode pemilu, namun juga dilanjutkan pada fase non-tahapan pemilu demi menjaga kelangsungan kinerja institusi dan persiapan organisasi yang bertugas mengawasi pemilu.

Masa di luar pengaturan pemilu adalah waktu krusial bagi Bawaslu untuk melaksanakan penguatan internal, menilai kinerja kelembagaan, serta memperbaiki sistem kerja lembaga. Dalam periode ini, aktivitas kelembagaan tetap dilakukan melalui pengelolaan dokumen dan arsip hasil pengawasan, serta melaksanakan program pencegahan dan peningkatan kapasitas organisasi. Cristiani dan rekannya (2024) menegaskan bahwa masa di luar tahapan pemilu berperan signifikan dalam menentukan kesiapan lembaga Bawaslu untuk menghadapi tahapan pemilu yang akan datang, terutama melalui penguatan sistem administrasi dan pengelolaan organisasi.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bawaslu tidak hanya terjadi selama tahap pemilihan, melainkan juga berlangsung terus-menerus pada periode non-tahapan pemilu. Masa non-tahapan pemilu adalah waktu di luar agenda resmi pelaksanaan pemilu, tetapi tetap memiliki fungsi penting dalam memastikan kesiapan serta kelangsungan operasi lembaga pengawas pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pengawasan atas pemilu harus bersifat berkelanjutan, sehingga Bawaslu tetap melaksanakan fungsi organisasinya meskipun tidak berada dalam fase pemilu. Selama waktu ini, perhatian Bawaslu beralih dari pengawasan di lapangan langsung kepada penguatan sisi internal organisasi melalui kegiatan evaluasi, konsolidasi lembaga, serta pengaturan sistem kerja.

Pada periode di luar tahapan pemilu, aktivitas Bawaslu lebih banyak berfokus pada urusan administrasi lembaga. Ini mencakup pengelolaan dokumen terkait hasil pengawasan, penyusunan laporan tanggung jawab mengenai kegiatan dan keuangan, pengaturan arsip lembaga, serta perbaruan data administrasi. Kegiatan-kegiatan ini didasarkan pada regulasi yang jelas, salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 mengenai Jadwal Retensi Arsip. Peraturan ini mengatur cara penyimpanan, pemeliharaan, serta pengurangan arsip lembaga dengan metode yang teratur dan akuntabel. Aturan ini menunjukkan bahwa administrasi dan pengarsipan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas Bawaslu, terutama dalam memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan lembaga di luar tahapan pemilu.

Dalam sudut pandang administrasi publik, administrasi bukan sekadar aktivitas pencatatan atau penyimpanan dokumen, tetapi merupakan sistem manajemen organisasi yang komprehensif. Pasolong (2019) menyatakan bahwa administrasi publik adalah serangkaian kegiatan kolaboratif yang dilakukan secara terencana untuk mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan yang efisien dan bertanggung jawab. Administrasi publik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan atas semua aktivitas organisasi. Di lembaga publik seperti Bawaslu, administrasi berfungsi sebagai alat krusial dalam memastikan keteraturan operasional, keabsahan data, serta akuntabilitas institusi, khususnya di luar periode pemilu ketika kesuksesan organisasi tidak diukur dari seberapa banyak pengawasan lapangan, tetapi melalui kesiapan dan keandalan internal lembaga.

Kinerja organisasi publik dalam periode non - tahapan pemilu sangat dipengaruhi oleh seberapa baik administrasi yang dilaksanakan. Dwiyanto (2018) mengemukakan bahwa penilaian kinerja lembaga publik tidak hanya berdasarkan output utama yang dicapai, tetapi juga mengenai sejauh mana lembaga dapat mempertahankan tata kelola internal, efisiensi operasional, dan akuntabilitas. Dalam hal ini, administrasi yang terorganisir dengan baik memberikan peluang bagi organisasi untuk menilai hasil pengawasan, mempersiapkan dokumen dan data untuk pemilu yang akan datang, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu, administrasi menjadi indikator krusial dalam mengevaluasi kinerja lembaga Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu.

Pengelolaan administrasi dalam suatu organisasi dapat diuraikan melalui konsep manajemen administrasi klasik yang diperkenalkan oleh Henry Fayol. Menurut Fayol, efektivitas organisasi sangat bergantung pada pelaksanaan lima fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini menjadi kerangka utama dalam menjalankan aktivitas organisasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Dalam situasi Bawaslu di luar masa tahapan pemilu, aspek perencanaan tercermin dalam penyusunan program kerja administrasi dan pengelolaan arsip lembaga, sedangkan aspek pengorganisasian tampak dari distribusi tugas administrasi di antara unit kerja, pengarah dan koordinasi terlihat dalam pelaksanaan kegiatan administrasi antar bagian, sementara pengawasan diimplementasikan lewat pengecekan keutuhan dokumen dan pertanggungjawaban administrasi serta keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, teori manajemen administrasi yang dikemukakan oleh Henry Fayol sangat relevan untuk memahami fungsi administrasi dalam mendukung kinerja serta stabilitas lembaga Bawaslu.

Bawaslu Kota Surabaya, yang bertugas mengawasi pemilihan umum di tingkat kota, menghadapi berbagai tantangan administratif yang cukup rumit saat masa non-tahapan pemilu. Tantangan ini dapat dilihat dalam cara pengelolaan dokumen pengawasan, pengelolaan keuangan, serta penyimpanan arsip yang berasal dari beragam kecamatan di Kota Surabaya. Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban Belanja, pengaturan arsip administrasi, dan penerapan sistem kerja berbasis digital merupakan elemen penting yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas lembaga. Administrasi yang terstruktur dengan baik sangat berperan dalam memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan memiliki peran yang sangat penting dalam kinerja lembaga pengawas pemilu. Cristiani et al. (2024) menekankan bahwa penguatan pengelolaan di dalam Bawaslu mendukung peningkatan mutu kinerja dan pelayanan dalam pengawasan pemilu melalui sistem operasi yang teratur dan transparan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih lebih banyak membahas pada tahapan pemilu, sedangkan diskusi mengenai optimalisasi pengelolaan di luar tahapan pemilu, terutama di level kota, masih cukup kurang. Padahal, kurangnya pengelolaan yang baik di masa non- tahapan pemilu dapat menyebabkan kesiapan dokumen yang rendah, akuntabilitas keuangan yang buruk, serta menghambat proses evaluasi dan perencanaan lembaga. Oleh karena itu, kajian mengenai optimalisasi administrasi pada masa non-tahapan pemilu, khususnya di tingkat kota, menjadi penting untuk memperkuat kinerja kelembagaan Bawaslu secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memahami secara rinci praktik administrasi dalam menunjang kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya pada masa non-tahapan pemilu. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan dokumen, administrasi keuangan, serta penataan arsip kelembagaan. Menurut Nazir (2014), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fakta, prosedur, serta kondisi tertentu yang terjadi dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mengkaji proses optimalisasi administrasi serta kontribusinya terhadap kinerja kelembagaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pengelolaan Dokumen Administrasi

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun berada di luar periode pemilu, Bawaslu Kota Surabaya tetap menjalankan pengelolaan dokumen administrasi dengan cara yang terstruktur dan rapi. Dokumen yang dikelola mencakup surat menyurat, laporan pengawasan, serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan institusi. Proses pengelolaan mencakup pencatatan, pengelompokan, dan penyimpanan berdasarkan jenis dan fungsinya. Selain mengelola dokumen fisik, Bawaslu Kota Surabaya juga mulai menerapkan digitalisasi dokumen untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mempermudah akses arsip.

Temuan ini menggaris bawahi bahwa administrasi lebih dari sekadar kegiatan teknis pencatatan, melainkan merupakan sistem penting yang mendukung kelancaran operasional organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Pasolong (2019) yang mengemukakan bahwa administrasi publik adalah serangkaian aktivitas dalam mengelola sumber daya organisasi secara sistematis untuk mencapai target organisasi secara efektif dan bertanggung jawab. Pengelolaan dokumen yang dilakukan dengan baik memungkinkan Bawaslu Kota Surabaya untuk menjaga keseimbangan kerja dan mempermudah proses evaluasi institusi di luar masa pemilu.

Administrasi Keuangan dan Manajemen Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ)

Peningkatan administrasi di Bawaslu Kota Surabaya juga terlihat dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam pembuatan dan penyimpanan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ). Berdasarkan studi yang dilakukan, proses pengelolaan SPJ melibatkan pengumpulan dokumen pendukung, input data keuangan, validasi dokumen, serta penyimpanan yang terstruktur. Setiap SPJ disusun sesuai dengan regulasi yang ada untuk menjamin tanggung jawab dalam penggunaan anggaran.

Pengelolaan keuangan yang baik menunjukkan adanya usaha dari lembaga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Dwiyanto (2018) menyatakan bahwa kinerja instansi publik diukur tidak hanya dari hasil yang dicapai, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam mempertahankan manajemen internal dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan SPJ yang terorganisir dengan baik mendukung peningkatan kinerja Bawaslu Kota Surabaya, terutama selama periode non-tahapan pemilu ketika pengawasan lapangan bukanlah perhatian utama.

Penataan dan Pengarsipan Arsip Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan dan pengarsipan arsip kelembagaan menjadi salah satu fokus penting dalam optimalisasi administrasi di Bawaslu Kota Surabaya. Arsip yang dikelola meliputi arsip kegiatan pengawasan, arsip administrasi keuangan, serta

arsip surat-menyurat. Penataan arsip dilakukan dengan mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis dan tahun kegiatan, serta disesuaikan dengan ketentuan jadwal retensi arsip yang berlaku. Selain arsip fisik, lembaga juga mulai mengembangkan pengarsipan berbasis digital.

Penataan arsip yang terorganisir memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen dan mendukung proses evaluasi kelembagaan. Dalam perspektif manajemen administrasi, kegiatan pengarsipan merupakan bagian dari fungsi pengawasan (controlling) sebagaimana dikemukakan oleh Henry Fayol. Arsip yang tertata dengan baik memungkinkan organisasi memastikan bahwa seluruh aktivitas administrasi dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara sistematis. Dengan demikian, penataan arsip berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kesiapan kelembagaan Bawaslu Kota Surabaya pada masa non-tahapan pemilu.

Penerapan Sistem Kerja Administrasi Berbasis Digital

Implementasi sistem kerja administrasi yang berbasis digital adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan administrasi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Surabaya. Sistem ini digunakan untuk memasukkan data administrasi, menyimpan dokumen dalam format digital, serta memfasilitasi komunikasi antar bagian di dalam organisasi. Dari analisis yang dilakukan, bisa disimpulkan bahwa penerapan sistem digital ini berdampak baik terhadap peningkatan efisiensi kerja serta mempercepat proses administrasi. Kendati demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti banyaknya dokumen yang harus dikelola dan keterbatasan sumber daya pendukung.

Dalam perspektif teori manajemen administrasi menurut Henry Fayol, penggunaan sistem digital dapat dilihat sebagai satu elemen dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian yang bertujuan untuk memperbaiki efektivitas operasional organisasi. Sistem kerja berbasis digital memfasilitasi lembaga untuk mengatur aktivitas administrasi dengan lebih efisien serta membantu lembaga siap menghadapi tahapan pemilu yang akan datang. Dengan demikian, digitalisasi dalam administrasi menjadi salah satu langkah strategis yang penting untuk meningkatkan kinerja Bawaslu Kota Surabaya di luar waktu tahapan pemilu.

Optimalisasi Administrasi dalam Menunjang Kinerja Kelembagaan

Secara keseluruhan, analisis dan diskusi memperlihatkan bahwa peningkatan administrasi mempunyai peranan penting dalam mendukung kinerja lembaga Bawaslu Kota Surabaya pada periode di luar tahapan pemilu. Pengaturan dokumen yang baik, pengelolaan keuangan yang transparan, penyusunan arsip yang benar-benar teratur, serta penggunaan sistem kerja yang berbasis digital menjadi elemen kunci dalam memelihara efektivitas dan akuntabilitas lembaga.

Hasil ini semakin menguatkan pandangan bahwa administrasi adalah fondasi utama bagi organisasi publik. Peningkatan administrasi memungkinkan Bawaslu Kota Surabaya untuk terus menjalankan fungsi institusionalnya secara berkesinambungan meskipun tidak berada dalam tahapan pemilu, serta mempersiapkan lembaga untuk menghadapi tahapan pemilu dalam waktu yang akan datang. Dengan demikian, administrasi berperan tidak hanya sebagai dukungan, melainkan sebagai komponen strategis dalam mempertahankan kinerja dan kestabilan kelembagaan Bawaslu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi yang didapatkan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi sistem administrasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja kelembagaan Bawaslu Kota Surabaya pada masa non-tahapan pemilu. Penerapan pengelolaan dokumen secara tertib dan sistematis, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penataan arsip kelembagaan yang terorganisir, serta digitalisasi sistem kerja administrasi terbukti mampu memperkuat efektivitas operasional organisasi,

meningkatkan efisiensi proses administratif, dan memastikan akuntabilitas institusional. Kesadaran akan pentingnya administrasi sebagai fondasi utama dalam organisasi publik, terutama selama periode non-tahapan pemilu, menyadarkan bahwa penguatan sistem administrasi tidak hanya berfungsi mendukung kegiatan organisasi secara operasional, tetapi juga sebagai strategi esensial dalam menjaga keberlangsungan, stabilitas, dan kesiapan organisasi dalam menyongsong tahapan pemilu yang akan datang. Meskipun optimisasi ini menunjukkan hasil positif, tantangan seperti tingginya volume dokumen dan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi harus terus diupayakan untuk diatasi dengan inovasi dan pengembangan sistem manajemen administrasi yang berkelanjutan. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien merupakan faktor penunjang utama keberhasilan lembaga pengawas pemilu dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Fayol, H. (2016). *General and industrial management*. Ravenio Books.
- Cristiani, L., Nurachmah, N., Bonpalda, G. G., & Damayanti, A. P. (2024). Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Pengawasan Pemilu. *POPULIKA*, 12(1), 87-97.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian: Ghalia Indonesia: Bogor*. Phillips, W., Holloway, J., Warrington, B., & Venuto, B.(2009). Stocker and feedlot performance of Beef Heifers Sired by Braunvieh and Wagyu Bulls from Angus-, Brahman-, Senepol-, and Tuli-sired Dams. *The Professional Animal Scientist*, 25(6), 809-814.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*.